



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA *IDLE*
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.6/WKN.09/KNL.01/IDLE/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 ditetapkan sebagai Barang Milik Negara *idle*;
 - b. bahwa barang milik negara Cq. Kementerian Agama R.I. sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah diserahkan kepada Pengelola Barang sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-01/WKN.09/KNL.01/2014, BAST-984/SJ/B.III/3/KS.01.1/2014 Tanggal 11 Maret 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara Idle pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA *IDLE* PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH.**

l

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara *idle* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna; dan
 3. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



l NUR SYAMl



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 85 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA IDLE
 PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA
 PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | KODE JENIS BMN | NUP | LOKASI | TAHUN PEROLEHAN | LUAS | NILAI BUKU | KONDISI | KET |
|---------------|---|--|-----|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora | 4.01.01.01.001 (Bangunan Gedung Kantor Permanen) | 13 | Kec. Randublatung, Kab. Blora | 1983 | 100 M ² | 71.000.000 | RB | Bangunan KUA Randublatung yang berdiri di atas tanah wakaf milik Yayasan Masjid At-Taqwa |
| Jumlah | | | | | | | 71.000.000 | | |

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,


 NUR SYAM